Pendahuluan

Reformasi bidang politik di Indonesia pada penghujung abad ke-20 M, telah membawa perubahan besar pada kebijakan pengembangan sector pendidikan, yang secara umum bertumpu pada dua paradigma baru yaitu otonomisasi dan demokratisasi. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah telah meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu yang diotonomisasikan bersama sektor-sektor pembangunan yang berbasis kedaerahan lainnya, seperti kehutanan, pertanian, koperasi, dan pariwisata. Otonomisasi sektor pendidikan kemudian didorong pada sekolah, agar kepala sekolah dan guru memiliki tanggung jawab besar dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Baik guru dan kepala sekolah, karena pemerintah daerah hanya memfasilitasi berbagai aktivitas pendidikan, baik sarana, prasarana, ketenagaan, maupun berbagai program pembelajaran yang direncanakan sekolah.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989. Salah satu isu penting dalam undang-undang tersebut adalah pelibatan masyarakat dalam pengembangan sektor pendidikan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 9 bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Pasal ini merupakan kelanjutan dari pernyataan pada pasal 4 ayat 1 bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Demokratisasi pendidikan merupakan implikasi dari dan sejalan dengan kebijakan mendorong pengelolaan sector pendidikan pada daerah, yang implementasinya di tingkat sekolah. Berbagai perencanaan pengembangan sekolah, baik rencana pengembangan sarana dan alat, ketenagaan, kurikulum serta berbagai program pembinaan siswa, semua diserahkan pada sekolah untuk merancangnya serta mendiskusikannya dengan mitra horizontalnya dari komite sekolah.

Terkait dengan demokratisasi penyelenggaraan sekolah ini, setidaknya ada tiga aspek yang menjadi pusat perhatian dalam kajian ini, yakni demokratisasi dalam penyusunan, pengembangan dan implementasi kurikulum di sekolah, demokratisasi dalam proses pembelajaran sejak penyiapan program pembelajaran, sampai implementasi proses pembelajaran dalam kelas dengan memberikan perhatian pada aspirasi siswa, tidak mengabaikan mereka yang lamban dalam proses pemahaman, dan tidak merugikan mereka yang cepat dalam pemahaman bahan ajar. Semua memperoleh pelayanan yang proporsional, dan semua harus berakhir dengan batas minimal pencapaian kompetensi sesuai angka yang ditetapkan bersama dalam koridor mastery learning. Kemudian, semua upaya demokratisasi tersebut juga tidak akan efektif membawa berbagai perubahan tanpa didukung dengan pola pengelolaan sekolah yang sesuai. Oleh sebab itulah, model manajemen yang harus dikembangkan dalam konteks demokratisasi sekolah tersebut adalah manajemen yang demokratis, yang memperbesar pelibatan teamwork dalam proses pengambilan putusan, perencanaan program, pendistribusian tugas dan wewenang, serta perubahan paradigma dalam menilai produktivitas kerja setiap unsur dalam organisasi sekolah, dengan orientasi kepuasan pelanggan.

Demokratisasi dalam kurikulum dan proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik bila pola pengelolaan sekolahnya otokratis, sentralistik dan kurang aspiratif serta kurang pelibatan mitra horizontal sekolah. Usulan-usulan kreatif guru akan selalu tersandung oleh aturan-aturan birokrasi dan kekuasaan vertikal. Oleh sebab itu, demokratisasi kurikulum dan pembelajaran harus diimbangi dengan demokratisasi dalam pengelolaan dan manajemen sekolah, dengan pelibatan seluruh unsur dalam organisasi sekolah tersebut, bahkan dalam batas-batas tertentu, juga melibatkan client dan user sekolah, khususnya dalam evaluasi dan pengembangan kurikulum, serta upaya-upaya mengimplementasikan berbagai program dan gagasan cerdas pengembangan sekolah.

Praktik sekolah demokratis ini tentu memerlukan pelibatn. Dalam konteks assessment kurikulum, pelibatan aspiratif untuk menjaring berbagai gagasan pengembangan, bisa dilakukan pada semua level sekolah. Akan tetapi, dalam konteks pelibatan siswa dalam pengembangan proses pembelajaran, masih belum secara totalitas dikembangkan secara demokratis, khususnya untuk level sekolah dasar dan prasekolah, walupun berbagai penelitian di negara maju telah dicobakan sampai pada level taman kanak-kanak.

Sekolah Demokratis

MENGAPA REFORMASI DALAM PENDIDIKAN

Memasuki abad ke-21, isu tentang perbaikan sektor pendidikan di Indonesia mencuat ke permukaan, tidak hanya dalam jalur pendidikan umum, tapi semua jalur dan jenjang pendidiikan, bahkan upaya advokasi untuk jalur pendidikan yang dikelola oleh beberapa departemen teknis, dengan tuntutan social equity sangat kuat yang tidak hanya disuarakan oelah Departemen terkait sebagai otoritas pengelola jalur pendidikan tersebut, tapi juga oleh para praktisi dan mengambil kebijakan dalam pembangunan sektor pembinaan sumber daya manusia, karena semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan merupakan unsur-unsur yang memberikan kontribusi terhadap rata-rata hasil pendidikan secara nasional. Dengan demikian, kelemahan proses dan hasil pendidikan dari sebuah jalur pendidikan akan mempengaruhi indeks keberhasilan pendidikan secara keseluruhan.

Bersamaan dengan itu, di awal abad ke-21 ini, prestasi pendidikan di Indonesia tertinggal jauh di bawah negara-negara Asia lainnya, seperti Singapura, Jepang, dan Malaysia. Bahkan jika dilihat dari indeks sumber daya manusia, yang salah satu indikatornya adalah sector pendidikan, posisi Indonesia kian menurun dari tahun ke tahun. Padahal Indonesia kini sudah menjadi bagian dari masyarakat dunia yang sudah tidak bisa dihindari. Indonesia kini menjadi bagian dari kompetisi masyarakat dunia. Jika tidak bisa menjadi pemenang, maka akan menjadi yang kalah serta tertinggal dari masyarakat lainnya, khususnya dalam meraih pasar dan peluang kesempatan kerja yang tidak dibatasi oleh garis wilayah kenegaraan, tapi bergerak kian meluas, dan kini dimulai dari wilayah Asia Tenggara yang akan terus bergerak menjadi wilayah dunia. Oleh sebab itu, penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif serta memiliki berbagai keunggulan komparatif menjadi sebuah keharusan yang mesti menjadi perhatian dalam sektor pendidikan.

Terkait dengan persoalan serta pandangan di atas, ada beberapa pemikiran tentang pengembangan konteks pendidikan ke depan dalam memasuki abad ke-21 yang membawa berbagai problematika ekonomi, sosial dan politik sebagaimana telah dikemukakan di atas. Pemikiran-pemikiran tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi membuat bahan-bahan ajar yang harus disampaikan dalam proses pendidikan menjadi sangat banyak, dan bisa dikhawatirkan akan membuat stagnasi pengembangan ilmu dan peradaban, khususnya pada level pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, struktur program pendidikan tinggi harus mampu memberikan jaminan pemberian reward dan insentif yang memadai untuk pengembangan ilmu dan teknologi pada level pendidikan tinggi tersebut, sehingga temuan-temuan baru dalam bidang sains dan teknologi terus bertambah, dan peradaban terus meningkat.
2. Perkembangan teknologi akan terjadi terus-menerus dan bisa terjadi dalam percepatan yang tingi di berbagai negara yang berbeda-beda, dan akan mempengaruhi perkembangan ekonomi melalui industri dan jasa. Oleh sebab itu, pendidikan harus mampu menjembatani antara sektor kerja dengan kemajuan ilmu dan teknologi tersebut, melalui updating skill dan keterampilan serta berbagai temuan baru yang harus dikuasai oleh pekerja yang terkait dengan kemajuan ilmu dan teknologi.
3. Perubahan demografis akan terjadi di mana-mana dan akan membawa implikasi pada distribusi penduduk berdasarkan usia. Di negara-negara tertinggal akan memiliki indeks kelahiran yang tinggi. Dengan demikian, angka usia sekolah dasar juga tinggi, dan akan terus meminta perhatian untuk memperoleh prioritas. Sementara di negara-negara maju, angka kelahiran cenderung menurun. Dengan demikian, pada decade-dekade awal di abad ke-21 ini, negara-negara maju akan kekurangan usia angkatan kerja, sementara angka pension konstan atau mungkin meningkat, dan membutuhkan jaminan social dan kesehatan. Dengan demikian, negara-negara maju akan terus meningkatkan pendapatan negaranya melalui sector pajak dari sektor usaha jasa agar tetap bisa memberi jaminan bagi mereka yang pension, namun pada saat yang sama, negara maju akan sangat bergantung pada negara berkembang atau negara tertinggal, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Oleh sebab itu,

negara-negara berkembang harus merancang outcome pendidikannya agar bisa memasuki pasar global untuk angkatan tenaga kerja, mereka harus memiliki skill dan keterampilan, menguasai bahasa komunikasi global, dan memahami kultur negara-negara yang akan dikunjunginya.

4. Negara-negara terus akan menjadi saling ketergantungan satu dengan lainnya, yang tidak saja dalam sector ekonomi dengan dibukanya pasar uang di setiap negara, tapi juga sector politik dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, pendidikan harus mampu membuka cakrawala global tersebut, dan mampu mengarahkan sikap-sikap multikulturalisme, yang harus mereka miliki ketika akan memasuki pasar tenaga kerja di dalam maupun di luar negeri.
5. Kemajuan ilmu dan teknologi yang mendorong kemajuan sector ekonomi dengan keterbukaan pasar secara global, akan membawa implikasi terbentuknya masyarakat dunia baru. Pendidikan harus mampu mendesain masyarakat tersebut sebagai masyarakat humanis, cinta lingkungan, memelihara kestabilan ekosostem, antidrug, dan senantiasa hidup sehat.

Pandangan dan analisis di atas setidaknya merefleksikan beberapa faktor penting yang mendasari pentingnya reformasi pendidikan, yaitu:

1. Kegagalan pendidikan yang telah dilalui beberapa tahun silam dengan indicator rendahnya kualitas rata-rata hasil belajar siswa yang akan memasuki jenjang perguruan tinggi.
2. Perkembangan perekonomian dunia yang membuka akses pasar global, yang harus dihadapi dengan kesiapan kualitas SDM kompetitif.

Di samping, itu ada beberapa analisis rational mengapa reformasi pendidikan itu mutlak dilakukan dalam menghadapi era globalisasi di abad ke-21, dengan mengadaptasi terhadap argument-argumen William J. Mathis dari Vermont University (Mathis, 1994): 12-19), yaitu:

1. Perubahan pola pikir masyarakat akibat demokratisasi yang terus berpenetrasi pada seluruh aspek kehidupan, sehingga sekolah harus mampu memberikan layanan kepada masyarakat konstituennya secara fair, karena mereka adalah stakeholder-nya, dan sekaligus client dari sekolah tersebut. Masyarakat adalah kontributor terhadap sekolah (tidak terkecuali sekolah negeri, karena budgeting sekolah negeri dari anggaran pemerintah, yang juga adalah uang dari rakyat), dan mereka memiliki hak untuk dilayani.
2. Perubahan dunia yang sangat cepat, dan para siswa harus dipersiapkan untuk menghadapi berbagai perubahan tersebut, tidak hanya dalam aspek kemampuan komunikasi, tapi juga kecakapan dan kemampuan penyesuaian diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Tantangan ke depan adalah keragaman permintaan pasar, dan sekolah harus mampu mempersiapkan orang-orang yang akan mengisi kebutuhan tersebut. Sumber daya manusia yang diserap sekolah juga membawa keragaman tersebut. Dengan demikian tidak fair kalau semua siswa harus memiliki hanya satu keterampilan yang sama, dan jika terjadi, itu merupakan tragedy dalam masyarakat demokratis, karena masyarakat demokratis menghargai keragaman.
3. Kemajuan teknologi dalam semua sektor industri dan pelayanan jasa akan kian menggeser posisi manusia. Kecanggihan alat-alat teknologi semakin mengefisiensikan proses industri dan layanan jasa. Dengan demikian, pendidikan harus mempersiapkan SDM agar tidak tergeser oleh alat-alat modern itu, tapi justru menjadi bagian dari kemajuan-kemajuan tersebut.
4. Penurunan standar hidup, yakni bahwa pada generasi sebelum mereka, cadangan natural resource sangat kuat, dan seluruh umat manusia terpenuhi berbagai kebutuhan hidupnya oleh cadangan alam semesta. Pada generasi mereka, cadangan tersebut akan semakin menipis dan akan semakin habis. Dengan demikian akan terjadi penurunan standar hidup dan mereka harus diberitahu tentang kemungkinan-kemungkinan tersebut, yang bisa diatasi dengan penemuan-penemuan teknologi baru, serta dengan adanya kerjasama global antar satu bangsa dengan lainnya. Inilah intinya kehidupan demokratis dengan penguatan jaringan antar bangsa.
5. Perkembangan ekonomi akan semakin mengglobal, berbagai perusahaan yang berkantor pusat di Amerika atau jepang misalnya, memiliki kantor-kantor perwakilan di berbagai negara melalui kerjasama investasi bersama pengusaha lokalnya masing-masing. Ini adalah trend perkembangan ekonomi global ke depan, yang harus diketahui oleh para siswa sebagai sebuah kenyataan yang tidak mungkin dihindari.

6. Peranan wanita semakin kuat, posisi wanita tidak lagi marginal. Mereka memiliki hak dan peluang yang sama dalam karir dan pekerjaan dengan pria. Tidak ada diskriminasi pekerjaan atas dasar gender.
7. Pemahaman doktrin keagamaan kian terbuka dan inklusif. Agama tidak menjadi penghalang kemajuan, tapi justru mendorong perubahan-perubahan untuk perbaikan.
8. Peran media massa yang terus menguat, baik dalam mensosialisasikan berbagai perubahan social, mengkritik berbagai kebijakan maupun sebagai media untuk memperoleh berbagai hiburan alternative atau sumber informasi tambahan, melalui berbagai program televise, yang semuanya bisa menjadi kontributor pendidikan yang positif, dan bisa juga menjadi kendala yang negative bagi program-program pendidikan.

Pengembangan sekolah menuju model sekolah demokratis ini relevan untuk dilakukan karena berbagai argumentasi, yang secara garis besar dapat dikategorisasi menjadi dua, yaitu tipologi sekolah abad ke-21, dan model pembelajaran yang sesuai. Dalam konteks pertama, Lyn Haas (haas, 1994) menjelaskan, bahwa sekolah-sekolah sekarang harus dapat memenuhi beberapa kualifikasi ideal, yaitu:

1. Pendidikan untuk semua; yakni semua siswa harus memperoleh perlakuan yang sama, memperoleh pelajaran sehingga memperoleh peluang untuk mencapai kompetensi keilmuan sesuai batas-batas kurikuler, serta memiliki basis skill dan keterampilan yang sesuai dengan minat mereka, serta sesuai pula dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Paradigma yang memisahkan pendidikan akademik sebagai calon untuk memasuki pasar tenaga kerja, sudah tidak relevan lagi, karena perubahan yang menuntut masyarakat untuk menjadi bagian dari kontribusi untuk kemajuan.
2. Memberikan skill dan keterampilan yang sesuai dengan kemajuan teknologi terkini, karena pasar menuntut setiap tenaga kerjanya memiliki keterampilan penggunaan alat-alat teknologi termodern, kemampuan komunikasi global, matematika, serta kemampuan akses pada pengetahuan.
3. Penekanan pada kerjasama, yakni menekankan pada pengalaman para siswa dalam melakukan kerjasama dengan yang lain, melalui penugasan-penugasan kelompok dalam proses pembelajaran, sehingga mereka memiliki pengalaman mengembangkan kerjasama, karena trend pasar ke depan adalah pengembangan kerjasama, baik antara perusahaan, atau antara perusahaan dengan masyarakat dan yang lainnya, sehingga pengalaman mereka belajar akan sangat bermanfaat dalam artikulasi diri di lapangan profesi mereka.
4. Pengembangan kecerdasan ganda; yakni bahwa para siswa harus diberi kesempatan untuk mengembangkan multiple intelligence mereka, dengan memberi peluang untuk mengembangkan skill dan keterampilan yang beragam, sehingga mudah melakukan penyesuaian di pasar tenaga kerja.
5. Integrasi program pendidikan dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat, agar mereka memiliki kepekaan social.

Persoalan besar dalam UU No. 22 tahun 1999 adalah perubahan radikal dalam otoritas pengembangan pendidikan yang semula berada dalam kekuasaan pemerintah pusat melalui Depdiknasnya, kini terdelegasikan pada pemerintah daerah. Dan kini perubahan radikla tersebut memperoleh penguatan dengan diundangkannya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menegaskan dalam pasal 4 ayat 1 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa. Poin penting dalam ayat ini adalah penegasan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, artinya, bahwa keterlibatan masyarakat dan otoritas pengelola serta institusi-institusi pendukungnya akan lebih besar daripada pemerintah pusat.

Bersamaan dengan itu pula dalam pasal 9 dinyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Keikutsertaan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan mereka dalam komite sekolah atau dewan pendidikan daerah. Komite sekolah berhak ikut serta dalam merumuskan perencanaan pendidikan, tidak saja dalam perencanaan makro tapi sampai pada kebijakan restrukturisasi kurikulum, walaupun dalam batas-batas gagasan besar dan tidak harus memasuki wilayah teknis, karena itu sudah menjadi otoritas guru dan kepala sekolahnya. Demikian pula dengan evaluasi keberhasilan sekolah. Menurut pasal 9 di atas, masyarakat berhak untuk melakukan evaluasi terhadap sekolah, tidak saja dalam kerangka program pendidikan secara makro, tapi pada wilayah mikro, kebijakan pengembangan sekolah dalam semua aspeknya.

Kemudian pemerintah daerah juga diberi kewenangan oleh undang-undang sebagaimana dicantumkan dalam pasal 10 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada pasal 11 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Kemudian pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Demokratisasi Pengembangan Kurikulum

KURIKULUM, PENGERTIAN DAN MACAM-MACAMNYA

Mau dibawa ke mana anak-anak oleh sekolah, siapa yang paling berhak menentukan arah dan kebijakan sekolah. Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam penyelenggaraan sekolah, dalam sistem atau pendekatan apa pun. Semangat demokratis dalam penyelenggaraan sekolah akan menginspirasi bahwa public sekolah memiliki hak yang sangat kuat dan sangat besar dalam penetapan arah kebijakan kurikulum sekolah, barangkali sama kuatnya dengan pemerintah sendiri, karena client sekolah adalah publiknya dan pemerintah yang juga dalam konteks lain sebagai user, bukan terbatas dalam aspek penerimaan tenaga kerja pada instansi pemerintah saja, tapi lapangan kerja secara lebih luas di semua sector, pertanian, industri, jasa atau lainnya, di dalam negeri maupun di luar negeri. Semakin kompetitif SDM bangsa, maka akan semakin meningkat dignity bangsa tersebut di hadapan bangsa-bangsa lainnya. Sebaliknya semakin merosot daya saingnya, maka akan semakin menurun pula nation dignity-nya. Dengan demikian, public sekolah dan pemerintah sama-sama memiliki kepentingan dalam penetapan arah dan pendidikan anak-anak di sebuah sekolah.

Kurikulum merupakan inti dari sebuah sekolah, karena kurikulumlah yang mereka tawarkan pada publiknya, dengan dukungan SDM guru berkualitas, serta sarana sumber belajar lainnya yang memadai. Diskursus tentang kurikulum masih terus berjalan, apakah kurikulum itu hanya bermakna Cource Out Line atau GBPP, atau mencakup seluruh pengalaman yang diberikan pada anak dalam proses pendidikannya oleh guru. Dalam konteks ini Ronald C. Doll menjelaskan bahwa kurikulum sudah tidak lagi bermakna sebagai rangkaian bahan yang akan dipelajari serta urutan pelajaran yang akan dipelajari siswa, tapi seluruh pengalaman yang ditawarkan pada anak-anak peserta didik di bawah arahan dan bimbingan sekolah. Pengalaman yang diperoleh siswa dari program-program yang ditawarkan sekolah amat variatif, tidak sebatas hanya pembelajaran di dalam kelas, tapi juga lapangan tempat mereka bermain di sekolah , kantin, dan bahkan bis sekolah. Semua itu memberikan kontribusi pengembangan siswa, yang mempengaruhi perubahan-perubahan pada mereka.

Sesuai pengertian di atas, maka kurikulum, sebagaimana dikemukakan Sukmadinata memiliki beberapa karakteristik. yaitu:

1. Kurikulum sebagai suatu substansi, yakni bahwa kurikulum adalah sebuah rencana kegiatan belajar para siswa di sekolah, yang mencakup rumusan-rumusan tujuan, bahan ajar, proses kegiatan pembelajaran, jadwal dan evaluasi hasil belajar. Kurikulum tersebut merupakan sebuah konsep yang telah disusun oleh para ahli dan disetujui oleh para pengambil kebijakan pendidikan serta masyarakat sebagai user dari hasil pendidikan.
2. Kurikulum sebagai sebuah sistem, yakni bahwa kurikulum merupakan rangkaian konsep tentang berbagai kegiatan pembelajaran yang masing-masing unit kegiatan memiliki keterkaitan secara koheren dengan lainnya, dan bahwa kurikulum itu sendiri memiliki keterkaitan dengan semua unsure dalam ssistem pendidikan secara keseluruhan.
3. Kurikulum merupakan sebuah konsep yang dinamis, yakni bahwa kurikulum merupakan konsep yang terbuka dengan berbagai gagasan perubahan serta penyesuaian-penyesuaian dengan tuntutan pasar atau tuntutan idealisme pengembangan peradaban umat manusia.

Bersamaan dengan itu, Allan A. Glatthorn juga menjelaskan tiga variable penting dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah, dan menjadi bagian integral dari hidden curriculum yaitu:

1. Variabel organisasi
2. Variabel sistem social
3. Variabel budaya
   a. Rumusan tujuan sekolah yang jelas dan dapat dipahami oleh semua unsurnya, sebagai hasil konsensus antara pengelola adminsitrasi dan guru.
   b. Pengelola administrasi memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap guru dan begitu juga sebaliknya, guru memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap tenaga administrasi.
   c. Pengelola administrasi dan guru memiliki ekspektasi yang baik terhadap para siswa yang diartikulasikan dengan penguatan pelayanan akademik pada mereka.

d. Pemberian hadiah terhadap mereka yang mencapai prestasi terbaik, dan pemberian hadiah serta hukuman yang dilakukan secara fair dan konsisten kepada para siswa

Demokratisasi Pengembangan Kurikulum

Gambar 1

Tentang Model Perumusan Kurikulum Yang Relevan
Untuk Dikembangkan
(Adaptasi Dari Westmeyer)
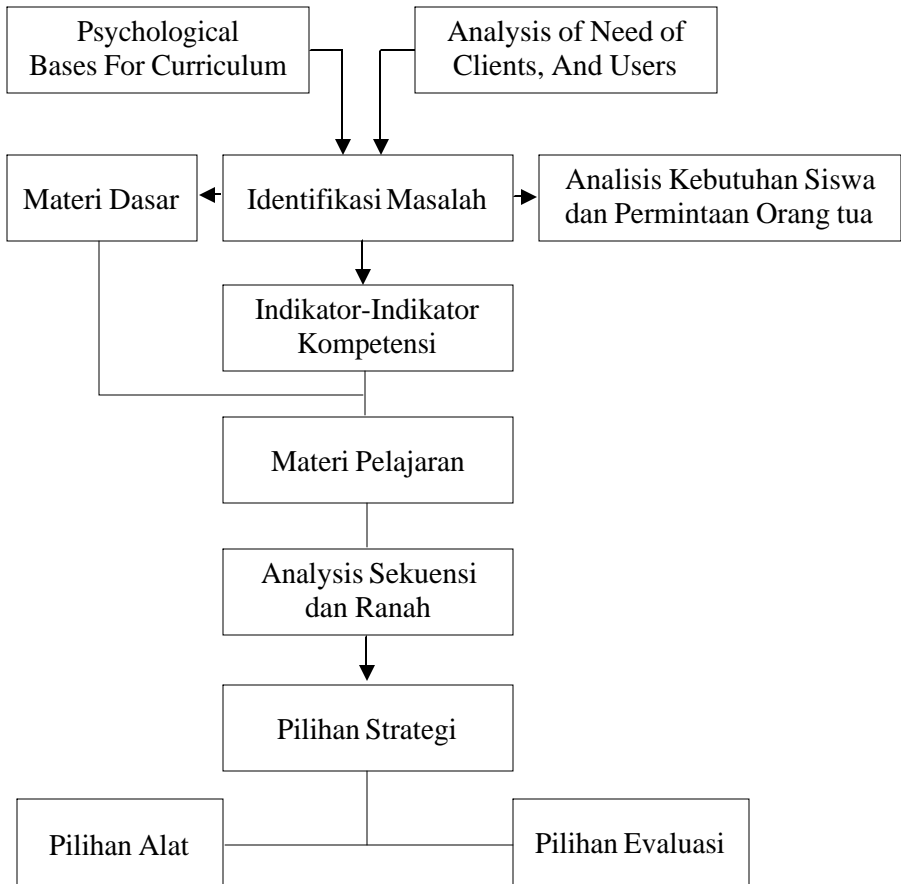
Demokratisasi Pengembangan Kurikulum

Gambar 2

Bidang-Bidang Yang Mempengaruhi Keputusan Kurikulum
(Adaptasi Wiles-Bondi).
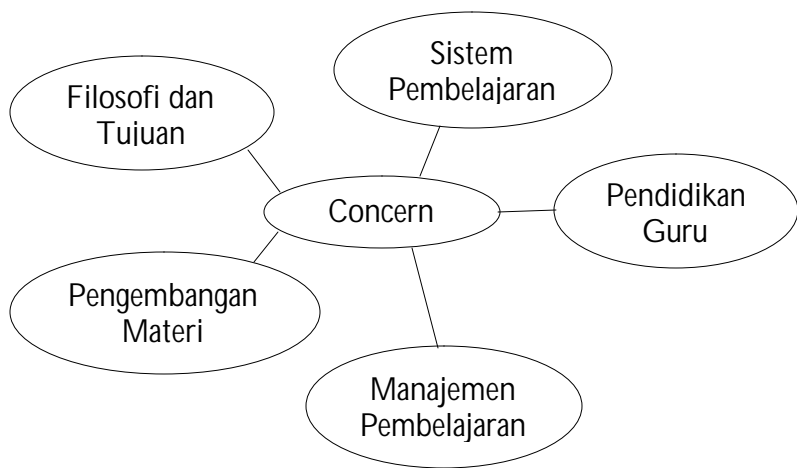
Gambar 3
Taksonomi Pilihan Kurikulum.

Pilihan Eclectic
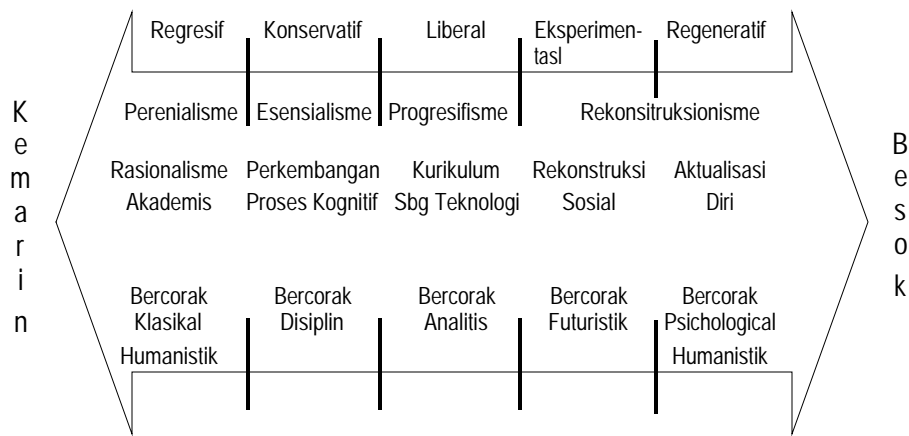
Aliran ini dikembangkan teritama oleh Ralph Tyler dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instructions, yang mengembangkan empat pertanyaan dalam penyusunan kurikulum, yaitu:

1. Apa tujuan pendidikan yang hendak dicapai sekolah?
2. Bagaimana mengembangkan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan?

3. Bagaimana mengembangkan pengalaman belajar yang efektif dalam proses pembelajaran?
4. Bagaimana proses pembelajaran efektif itu bisa dievaluasi?

KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI, APA, MENGAPA, DAN BAGAIMANA?

Bergulirnya UU No. 22 tahun 1999 membawa perubahan banyak pada kebijakan berbagai sector pembangunan, dan salah satunya adalah sector penddikan yang menjadi bagian dari sector-sektor yang diotonomisasikan pada daerah. Kajian dan pembahasan tentang otonomisasi sector pendidikan kemudian memunculkan sebuah paradigma baru, karena jika pengalihan otoritas pemerintah pusat pada daerah, maka pemerintah daerah akan menjadi serta kinerja para pelaksanaan dan pengelola pendidikan di tingkat sekolah. Oleh sebab itu, kebijakan yang cukup cerdas dan kini telah bergulir di daerah-daerah dalam rangka implementasi otonomi dalam pengelolaan pendidikan adalah, menugaskan pemerintah daerah untuk memfasilitasi program perluasan serta pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, sementara berbagai kebijakan akademisnya, baik dimensi pengembangan kurikulum maupun pengelolaan berbagai aspek operasional pendidikan, menjadi tugas dari setiap unit sekolah. Dengan demikian, otonomi pendidikan, pada aspek-aspek akademik, inisiasi pengembangan networking horizontal, serta peningkatan kinerja tenaga kependidikan dan layanan administrasi pendidikan, berada pada tingkat sekolah yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

1. Apa itu Kurikulum Berbasis Kompetensi

   Kalau Doll mendefinisikan bahwa kurikulum itu adalah seluruh pengalaman yang ditawarkan pada peserta didik di bawah arahan dan bimbingan sekolah, lalu apakah KBK juga mempunyai definisi yang sama, karena intinya juga kurikulum, hanya aksentualisasinya saja yang berbeda. Siskandar kepala pusat kurikulum Depdiknas mengemukakan, bahwa kurikulum berbasis kompetensi tiada lain adalah pengembangan kurikulum yang bertitik tolak dari kompetensi yang seharusnya dimiliki siswa setelah menyelesaikan pendidikan, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai dan pola berpikir serta bertindak sebagai refleksi dari pemahaman dan penghayatan dari apa yang telah dipelajari siswa. Demikian pula dengan Abdurrahman Saleh, dia menyatakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi adalah perangkat standar program pendidikan yang dapat mengantarkan siswa untuk menjadi kompeten dalam berbagai bidang kehidupan yang dipelajarinya.

   Bertitik tolak dari pandangan tersebut, maka pembahasan KBK terbatas pada pertimbangan penyusunan struktur kurikulum serta silabus dari setiap subjek mata pelajaran, termasuk berbagai kegiatan pembelajaran yang merupakan implikasi dari penekanan KBK tersebut. Dengan demikian, kompetensi merupakan pusat perhatian dalam perancangan kurikulum, berbagai kebijakan pusat perhatian dalam perancangan berbagai aktivitas belajar lainnya, mengikuti arah dan tujuan dari pembinaan kompetensi-kompetensi yang diharapkan.

   Lalu apa sebenarnya kompetensi itu. Siskandar mengemukakan, bahwa kompetensi itu adalah pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Demikian pula dengan rumusan yang dikemukakan dalam buku standar kurikulum nasional pendidikan keagamaan, bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dan kebiasaan-kebiasaan itu harus mampu dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, serta mampu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan,baik profesi, keahlian, maupun lainnya.

   Kemudian, perumusan kompetensi dalam kurikulum juga harus memenuhi beberapa aspek penting, yaitu:

   a. Kompetensi tersebut harus dapat didefinisikan secara jelas dalam standar yang dapat dicapai serta performance yang terukur.
   b. Kompetensi itu harus memiliki konteks, apakah konteks profesionalisme yang memerlukan keahlian-keahlian tertentu, keterampilan yang digunakan dalam lapangan pekerjaan, kompetensi komunikasi global, atau kompetensi akademik untuk studi lanjut.
   c. Kompetensi merupakan learning outcome yang mendeskripsikan apa yang dapat dibuat seseorang setelah melalui proses pembelajaran.
   d. Terkait dengan itu, maka kompetensi juga harus mendeskripsikan proses pembelajaran yang harus dilalui siswa untuk mencapai kompetensi harapan.

2. Mengapa Kurikulum Berbasis Kompetensi

Setiap kurikulum disusun dengan end-product berbagai kompetensi, termasuk kurikulum 1994, dan kurikulum-kurikulum sebelumnya, hanya saja pada kurikulum-kurikulum tersebut rumusan kompetensi diformat dalam bentuk rumusan tujuan, yang disusun secara hierarkis dari tujuan nasional, institusional, tujuan kurikuler, tujuan pembelajaran umum dan khusus. Kompetensi terlihat dalam rumusan tujuan pembelajaran khusus yang akan terakumulasi menjadi tujuan pembelajaran umum, dan seterusnya sampai tujuan nasional. Rangkaian isi tujuan pada masing-masing tahap itu berisi berbagai rumusan kompetensi yang diharapkan sebagai hasil pembelajaran.

Kendati demikian, ada beberapa perbedaan distingtif antara kurikulum 94 dengan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu:

a. Kurikulum 94 disusun oleh pemerintah pusat melalui departemen pendidikan nasional (dulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), dan daerah hanya diberi kewenangan menyusun kurikulum muatan local maksimal 20%. Sedangkan dalam KBK, pemerintah hanya menyusun kompetensi standar, sementara elaborasi sylabus-nya diserahkan pada daerah, yang selanjutnya diserahkan pada sekolah dengan para gurunya. Dan pada KBK, sekolah dengan para gurunya juga memiliki otoritas, tidak hanya menyusun sekwensi kurikulum tersebut yang lebih sistematis dan sistematik, namun mereka juga memiliki otoritas untuk memberikan penguatan-penguatan content of learning, baik atas dasar pertimbangan penguasaan siswa, maupun dalam upaya mengejar benchmark sekolahnya.
b. Kurikulum 94 pendekatan pembelajaran dan pengembangan kurikulum berbasis tujuan dan content, sedangkan pada KBK pengembangan kurikulum berbasis pada pengembangan kompetensi.

Aspek-aspek lain yang juga menjadi cirri KBK dibandingkan dengan kurikulum 94 adalah:

a. Sebagai konsekuensi perumusan kurikulum oleh pemerintah pusat, maka guru harus mampu memahami strukturnya dengan baik, serta merancang penyampaiannya pada siswa. Untuk itu semua, guru harus melakukan Analisis Materi Pelajaran (AMP) untuk melakukan penyesuaian metode, alat dan waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pembelajaran, serta diikuti dengan penyusunan Program Satuan Pelajaran (PSP) dan Rencana Pembelajaran (RP). Sedangkan dalam kurikulum berbasis kompetensi, guru harus merancang silabus yang relevan dengan kompetensi yang diharapkan, serta menetapkan strategi pembelajaran dan penugasan-penugasan pada siswa.
b. Dalam proses pembelajaran, kurikulum 94 juga pada hakikatnya menuntut siswa lebih aktif untuk melakukan proses pembelajaran dan menjadikan sekolah sebagai center for learning bukan center for teaching. Akan tetapi, implementasi active learning yang semata bertumpu pada lembar kerja siswa (LKS), proses pembelajaran menjadi sangat monoton dan kurang menyenangkan, serta kurang memberi ruang bagi siswa untuk mengartikulasikan diri sehingga memperoleh pengakuan lingkungannya. Oleh sebab itu, KBK active learning akan menjadi aksentuasi dengan perluasan pada model cooperative dan collaborative learning yang perancangan strategi serta sistem penilaiannya dibicarakan dengan siswa yang dituangkan dalam bentuk kontrak belajar, sehingga proses pembelajaran berjalan secara demokratis, dan menjangkau seluruh ranah yang diharapkan dalam proses pembelajaran.
c. Demikian pula dengan penilaian; pada periode keberlakuan kurikulum 94, penilaian lebih menekankan aspek kognitif dengan akumulasi antara nilai formatif, sumatif, sub-sumatif, serta prosedur tes lainnya. Sementara pada kurikulum berbasis kompetensi penilaian harus dilakukan secara variatif dan holistic tergantung kompetensi yang harus dicapainya. Untuk kompetensi kognitif penilaian kognitif dengan menggunakan instrument tes, sedangkan kompetensi afektif harus diukur dengan instrument pengukuran sikap yang di asses dengan instrument non-tes, sementara adaptasi pengetahuan pada kebiasaan dinilai dengan instrument-instrumen observasi, portofolio, serta model penilaian lainnya.

Gambar 4
Struktur Kompetensi Dalam KBK

Kompetensi Lulusan

Kompetensi Rumpun Mata Pelajaran I

Kompetensi Rumpun Mata Pelajaran II

Kompetensi Rumpun Mata Pelajaran III
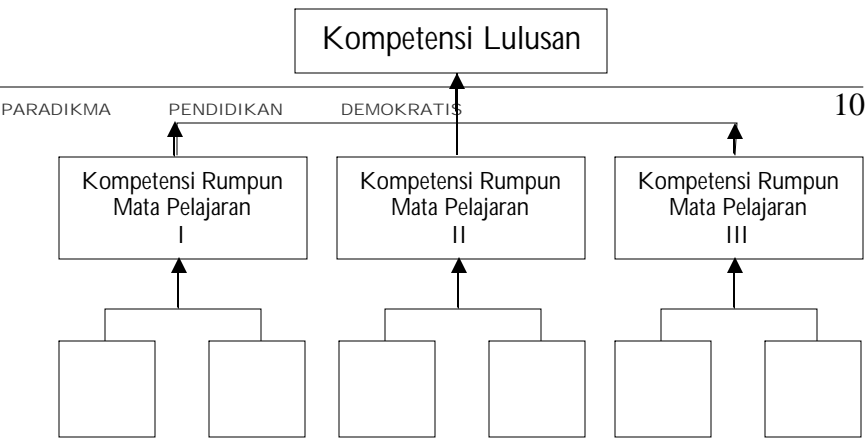
Gambar 5

Pola Hubungan Kerja Unsur-Unsur Pendukung
Kurikulum Berbasis Kompetensi
Antara Satu Dengan Lainnya
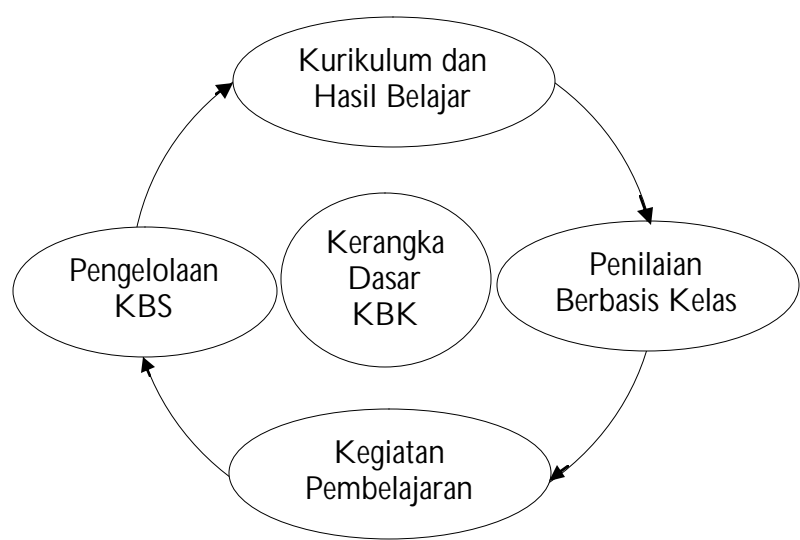
Sedangkan penilaian berbasis kelas adalah penilaian yang dilakukan guru terhadap kemajuan siswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan dan telah ditetapkan dalam kurikulum. Penilaian tersebut perlu dilakukan untuk memastikan bahwa siswa telah mengalami banyak perubahan sebagai hasil dari proses pembelajarannya. Penilaian dilakukan secara individual dengan signifikansi sebagai berikut:

1. Untuk mendiagnosis kekuatan dan kelemahan dari masing-masing siswa.
2. Untuk memonitor kemajuan siswa.
3. Menilai efektivitas proses pembelajaran.
4. Menilai efektivitas proses pembelajaran.

Gambar 6

Rangkaian Kegiatan Menuju Pola Belajar Tuntas Dikutif
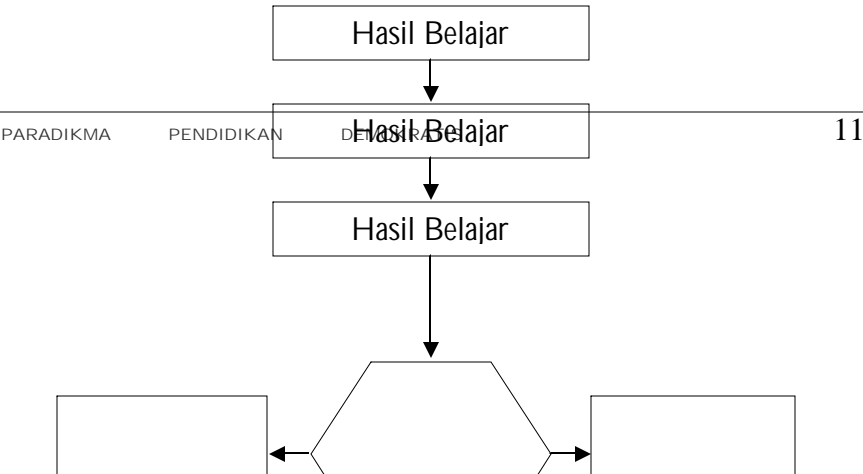
d. Berbagai Pendekatan Dalam Penyusunan KBK
   1. Relevansi
   2. Kontinuitas
   3. Fleksibel

   Sementara itu, untuk pengembangan kurikulum ini, dalam prinsip KBK dikemukakan dalam buku kebijakan pengembangan kurikulum madrasah, bahwa pengembangan kurikulum itu harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai pendekatan sebagai berikut (Mapenda, 2003).

   1. Sistematis dan sistemik
   2. Kemitraan
   3. Pengembangan
   4. Relevansi
   5. Validasi.

5. Prosedur Pengembangan KBK di Tingkat Sekolah
   1) Kompetensi Kognitif
      a. Knowledge
      b. Comprehension
      c. Application
      d. Analysis
      e. Synthesis
      f. Evaluation
   2) Kompetensi Afektif
      a. Receiving
      b. Responding
      c. Valuing
      d. Organiazation
      e. Characterization
   3) Kompetensi Psikomotorik
      a. Observing
      b. Imitating
      c. Practicing
      d. Adapting

Gambar

Kewenangan Masing-Masing Unit
Adaptasi Dari Wiles

a. Penyiapan Peraturan Pemerintah
b. Penyiapan Standar kompetensi tingkat nasional
c. Penyiapan anggaran

a. Penyesuaian buku teks
b. Penyesuaian aturan-aturan

a. Komite pendidikan
b. Pengalokasian anggaran
c. Fasilitasi pendidikan

a. Koordinasi program
b. Komite kurikulum
c. Pelayanan administrasi

a. Rancangan kompetensi dan indikator kompetensi, serta materi pelajaran
b. Perencanaan pembelajaran
c. Strategi pembelajaran dan evaluasi

Gambar 8

Aspek-Aspek Yang Harus Dianalisis Dalam Pengembangan Kurikulum Adaptasi Dari Westmeyer
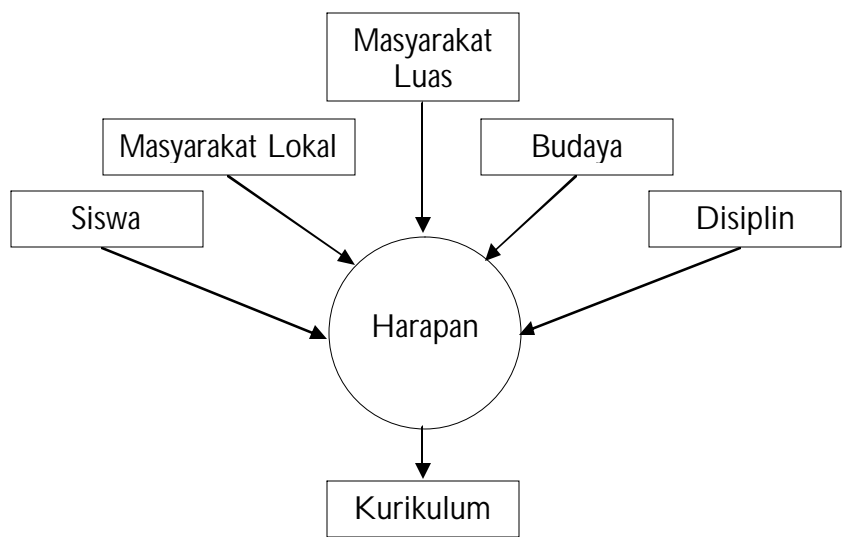
Mengajar Yang Membelajarkan

MENGAJAR DAN BELAJAR

Mengajar, inilah kata kunci yang sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah proses pendidikan, dan mengajar pulalah yang mendapat kritik keras dari Paulo Freire dengan model pembelajaran pasif, yakni guru menerangkan, murid mendengarkan, guru mendiktekan, murid mencatat, guru bertanya, murid menjawa, dan seterusnya. Paulo Freire menyebutnya dengan pendidikan gaya bank, yakni pendidikan model deposito, guru sebagai deposan yang mendepositokan pengetahuan serta berbagai pengalamannya pada siswa, siswa hanya menerima, mencatat dan mem-file semua yang disampaikan guru. Pendidikan model bank tersebut menurut Freire merupakan salah satu bentuk penindasan terhadap siswa-siswa, karena menghambat kreativitas dan pengembangan potensi mereka.

Pengajaran model itu terkadang juga disebut sebagai pendidikan gaya komando, dan menurut Muska Mosston, gejala tersebut muncul dalam decade 60-an sampai 70-an, yang mengembangkan prinsip distribusi sebuah keputusan harus dilakukan secara hierarkis, dari atas ke bawah, dari guru pada siswa. Dalam pengajaran gaya komando, semua perencanaan ditentuakan oleh guru, disampaikan pada siswa, dan siswa menerima pelajaran, mengubah perilaku sesuai dengan pelajaran baru. Akan tetapi, mereka tidak terlibat dalam proses analisis untuk penerapan pengalaman baru tersebut pada konteks kehidupan lain, dan lebih jauh lagi, mereka juga tidak terlibat dalam pembahasan feed back buat guru.

Pengajaran model gaya komando ini menurut Mosston merupakan salah satu bentuk akhir polarisasi aliran behaviorisme, yang kemudian memperoleh kritik keras karena mamatikan semangat demokratisasi dan mematikan kreativitas siswa, tidak menghargai siswa dan kurang peduli terhadap keragaman siswa. Oleh sebab itu, kemudian berkembang model task style, yakni belajar antara penugasan dan instructional, dan diikuti kemudian dengan kemunculan berbagai model sampai kini muncul model collaborative and cooperative learning yang dikembangkan oleh aliran psikologi developmental, yang menekankan pada aktivitas siswa dan dibantu oleh guru. Namun sebelum lebih jauh membahas tentang model mengajar efektif untuk era reformasi saat ini, perlu diperjelas terlebih dahulu tentang apakah mengajar itu, pengertian seperti apa yang akan digunakan untuk mengajar dalam konteks mendorong perwujudan sekolah demokratis.

Sedangkan aliran psikologi kognitif memandang bahwa belajar adalah mengembangkan berbagai strategi untuk mencatat dan memperoleh berbagai informasi, siswa harus aktif menemukan informasi-informasi tersebut, dan guru bukan mengontrol stimulus, tapi menjadi partner siswa dalam proses penemuan berbagai informasi dan makna-makna dari informasi yang diperolehnya dalam pelajaran yang mereka bahas dan kaji bersama. Aliran constructivisme yang dikembangkan dari psikologi kognitif ini menekankan teorinya bahwa siswa amat berperan dalam menemukan ilmu baru.

Contructivisme adalah aliran yang mengembangkan pandangan tentang belajar yang menekankan pada empat komponen kunci, yaitu:

1. Siswa membangun pemahamannya sendiri dari hasil mereka belajar bukan karena disampaikan pada mereka.
2. Pelajaran baru sangat tergantung pada pelajaran sebelumnya.
3. Belajar dapat ditingkatkan dengan interaksi social.
4. Penugasan-penugasan dalam belajar dapat meningkatkan kebermaknaan proses pembelajaran.

Namun di tengah-tengah derasnya kritik terhadap behaviorisme, Kevin Wheldall dan Ted Glynn mengembangkan sebuah paradigma behaviorisme dengan constructivisme, dengan argumentasi bahwa disadari atau tidak, para guru telah dan terus menerapkan prinsip-prinsip behaviorisme dalam pengembangan proses pembelajarannya di dalam kelas, namun mereka juga tidak mau tertinggal dengan berbagai perkembangan terbaru dalam peningkatan efektifitas pembelajaran. Demikian dikemukakan oleh Denis Child, editor buku Wheldall. Sedangkan teori-teori Kevin Wheldall dan Ted Glynn yang mensintesiskan teori behaviorisme dengan contructivisme yang berbasis teori psikologi developmental, adalah sebagai berikut:

Penggunaan metode-metode yang sesuai dengan kebutuhan analisis perilaku, yakni pelaksanaan pembelajaran dengan menekankan prosedur yang sistematis, selalu mengulang pengukuran perilaku yang termati, dan menggunakan berbagai strategi yang logis untuk mencapai perilaku yang diharapkan.

1. Mengenali, mengakui berbagai konteks dan keadaan serta lingkungan yang penting dan mempengaruhi proses pembelajaran siswa. Berbagai strategi yang akan meningkatkan efektifitas belajar siswa harus dikembangkan.
2. Berusaha untuk memaksimalkan penggunaan berbagai penguat natural, kapan saja sejauh akan melahirkan konsekuensi positif untuk perubahan perilaku, dan mereka akan mampu melakukan generalisasi dari berbagai pengalaman belajar mereka, dan mampu mengaplikasikannya pada kehidupan yang lebih luas. Berbagai kemungkinan penguatan artificial harus digunakan secara selektif jika belum terbukti bahwa penguatan tersebut cukup produktif.
3. Responsif terhadap berbagai data dari hasil penelitian aliran non-behavioural. Aliran behavioural tidak boleh selalu mengklaim bahwa hasil penelitian alirannya yang dapat dipakai. Hasil-hasil penelitian aliran lain seperti hasil penelitian aliran psikologi developmental merupakan sesuatu yang sangat berarti untuk interaksi orang dewasa dan anak-anak dalam seting social yang natural. Berbagai hasil penelitian dari aliran lain dapat memperkaya teori aliran behavioural dalam memperkaya perumusan teori-teori tentang belajar mengajar.
4. Penekanan pada belajar interaktif. Aliran behavioural menghindari penjelasan satu arah dalam proses pembelajaran, dan mengadaptasi teori interactive learning, yang mengakui bahwa guru harus mengubah strategi sebagai respon terhadap pembelajar (siswa) saat terjadi perubahan perilaku belajar pada siswa.
5. Selalu berusaha untuk membantu siswa, agar mereka dapat memberikan control yang lebih besar terhadap proses belajarnya sendiri. Dalam upaya membantu siswa agar lebih independent dalam belajar, kita harus mempersiapkan konteks belajar bagi mereka, dan mereka diberi kesempatan untuk memberikan kontrol yang lebih besar terhadap proses belajarnya sendiri. Konsekuensinya, siswa harus dibenarkan untuk memilih topic-topik belajar mereka, menentukan waktu dan konteks interkatif belajar mereka, menentukan waktu dan konteks interaksi belajar mereka. Dengan demikian, bahan-bahan belajar untuk anak-anak (yang sudah dipersiapkan) bisa menjadi sesuatu yang bertentangan dalam pendekatan tersebut.
6. Memperluas program-program pendidikan tidak hanya program persekolahan tapi juga mencoba menambah dan memperkuat siswa dengan membuka peluang bagi mereka untuk mempelajari berbagai keahlian dan keterampilan akademik dan sosial yang sesuai dengan kehidupan nyata. Kami tidak menganggap bahwa jawaban terbenar terhadap hasil pendidikan adalah yang terikat dengan apa yang telah diberikan guru dan sekolah, tapi juga orang tua dan teman sebaya yang telah memberikan banyak nilai pada mereka melalui interaksinya. Kontribusi mereka terhadap hasil belajar anak-anak sangat besar yang tidak bisa dinilai.
7. Mendorong inisiatif yang dikembangkan oleh para siswa sendiri. Kami bermaksud untuk mempersiapkan berbagai konteks yang dapat meningkatkan inisiatif para siswa dan yang dapat mendorong para guru untuk meresponi inisiatif tersebut.
8. Menghargai setiap kesempatan belajar yang muncul dari berbagai kesalahan. Bahwa kesalahan-kesalahan itu menyediakan kesempatan belajar yang amat berguna. Guru dan siswa harus sama-sama mencari dan memperoleh informasi untuk mendapatkan strategi yang dibutuhkan untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam belajar. Metode aliran behavioural constructive merancang untuk mendorong belajar tanpa kesalahan, dan melarang guru dan siswa untuk mengakses peluang berbagai kesalahan tersebut.
9. Mengakui kompleksitas skil guru professional yang dibutuhkan oleh setiap guru. Kami benar-benar menolak ide untuk mencoba menghasilkan bahan ajar yang dihasilkan guru yang dapat menurunkan peran-peran profesionalisme guru. Riset-riset aliran behavioural kini terus berusaha untuk melengkapi guru dengan berbagai keterampilan dan prosedur untuk dapat digunakan dalam praktik secara langsung dalam menciptakan proses pembelajaran yang sesuai konteks bagi para siswa yang adalam didikannya. Semuanya ini termasuk perumusan model yang mendekati perilaku akademik dan social, dan mengembangkan kerjasama dengan orang tua, teman sebaya, serta para professional dalam prosedur yang dikembangkan untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran siswa.

Untuk menjadi warga yang cerdas, setiap anak harus di didik dibina agar memiliki berbagai keahlian, skil dan keterampilan sesuai dengan talenta dan kemampuan yang mereka miliki. Gagasan besar tersebut sangat mudah diucapkan namun sukar untuk dirumuskan secara definitive untuk mencoba menyusun langkah-langkah yang akurat menuju ide-ide tersebut. Apakah smart citizen dengan berbagai kualifikasi idealnya sebagaimana telah dikemukakan di atas, bisa dicapai dengan pengembangan kemampuan kecerdasan dalam tahapan-tahapan kognitif seperti konsep Benjamin S. Bloom, yakni pengembangan kemampuan berpikir pada enam (6) level, dari mengenal, memahami, mengaplikasi, analisis, membuat sintesis dan melakukan evaluasi, yang kemudian diinternalisasi dengan perlakuan afektif dan dibiasakan dengan perlakuan psikomotorik. Pertanyaan besar ini masih terus diwacanakan di kalangan para peneliti dan peminat pendidikan. Salah satu hipotesisnya adalah kecerdasan seseorang, dalam sains dan teknologi tidak menjamin kesuksesan karir hidup dengan kemampuannya itu, tanpa diperkuat kecerdasan-kecerdasan lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan kemitraan dengan orang lain, mengembangkan kepercayaan diri, serta berbagai kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal yang diperlukan dalam artikulasi keilmuannya. Oleh sebab itu, Donald P. Kauchak mengangkat teori multiple intelligence yang dikutipnya dari hasil penelitian Howard Gardner, yakni kecerdasan seseorang tidak hanya diukur dengan tingkat intelligence question yang hanya mengukur tiga variable, yakni berpikir abstrak dan rasional, kemampuan penyelesaian masalah, dan kemampuan penguasaan pengetahuan, tapi dalam berbagai aspek yang sangat diperlukan dalam pengembangan kehidupan ke depan. Menurut Howard Gardner, terdapat tujuh (7) variable yang bisa diukur untuk melihat kecerdasan seseorang, yakni:

1. Linguistic intelligence
2. Logical-mathematical intelligence
3. Misical intelligence
4. Spatial intelligence
5. Bodily-kinesthetic intelligence
6. Interpersonal intelligence
7. Intrapersonal intelligence

Gambar 9

Model Pembelajaran Problem Solving
Adaptasi Dari Donal P. Kauchak

Identifikasi Masalah

Merumuskan Masalah

Pemilihan Strategi

Pemilihan Strategi

Evaluasi Hasil

Model belajar problem solving tersebut, kini sudah mulai dikembangkan dengan modelpembelajaran portofolio. Pembelajaran dengan outcome level tertinggi lainnya adalah pengembangan criticak thinking yakni kemampuan berpikir kritis, yang bisa dikembangkan sejak dini, dan tidak tergantung pada tingkat intelligence question, namun pada intensitas pembinaan dan kebiasaan melatih anak berpikir kritis. Kenneth D Moore (moore, 2001: 113) memberikan ilustrasi bahwa berpikir kritis itu lebih kompleks daripada berpikir biasa, karena berpikir kritis berbasas pada standar objektivitas dan konsisten. Guru, menurutnya pula, harus membiasakan siswa untuk mengubah pola berpikirnya, yakni:

1. Dari menduga menjadi mengestimasi.
2. Dari memilih menjadi mengevaluasi
3. Dari pengelompokan menjadi pengklasifikasian.
4. Dari percaya menjadi menduga.
5. Dari penyimpulan dengan dugaan pada penyimpulan secara logis.
6. Dari selalu menerima konsep pada mempertanyakan konsep.
7. Dari menduga menjadi menghipotesis.
8. Dari menawarkan pendapat tanpa alas an pada penawaran pendapat dengan argumentasi.
9. Dari membuat putusan tanpa criteria pada pembuatan putusan dengan criteria.

Secara umum ada empat tahap dalam peningkatan kebiasaan berpikir kreatif yang bisa dikembangkan pada berbagai aktivitas belajar siswa, yakni:

1. Persiapan, yakni proses pengumpulan berbagai informasi untuk diuji (sebagai sebuah opsi dalam penyelesaian masalah, jika kreativitas ini dikembangkan untuk menyelesaikan masalah). Pemikir kreatif akan mempertanyakan dan menginvestigasi hubungan antara kejadian, ide dan tujuan, sampai dia memperoleh sebuah hipotesis.
2. Inkubasi, yakni suatu rentang waktu untuk merenungkan hipotesis tersebut sampai dia memperoleh sebuah keyakinan bahwa hipotesisnya itu sangat rasional. Masa inkubasi ini bisa dipersingkat.
3. Iluminasi, yakni fase kecerahan saat pemikir memperoleh keyakinan benar bahwa hipotesisnya itu yang paling kuat dan paling benar.
4. Verifikasi, yakni pengujian kembali hipotesisnya untuk dijadikan sebuah rekomendasi perbaikan atau perubahan berdasarkan hasil temuan baru. Verifikasi ini memerlukan data yang dapat menguji rumusan hipotesisnya itu.

Gambar 10

Tahapan Prosedur Berpikir Kreatif

Tabel 11
Tabel Taxonomy Of Thinking

No	Jenis Kegiatan	Indikator-Indikator Kecakapan
01	Kemampuan Berpikir Strategis	
	a. Kemampuan menyelesaikan masalah	Mengenali masalah, merumuskan masalah, menyusun pilihan-pilihan penyelesaian masalah, melaksanakan rencana penyelesaian masalah, dan mengevaluasi hasil penyelesaian masalah
	b. Kemampuan membuat keputusan	Mampu merumuskan tujuan, kemampuan mengidentifikasi beberapa alternatif, kemampuan menganalisis alternatif, kemampuan mengambil keputusan terhadap pilihan terbaik, dan memilih satu pilihan sebagai sebuah putusan akhir
02	Kemampuan Berpikir Kritis	Mampu membedakan antara fakta yang biasa diverifikasi dengan tuntutan nilai, mampu membedakan antara informasi, alasan, dan tuntutan-tuntutan yang relevan dengan yang tidak relevan, mampu menetapkan fakta yang akurat, mampu menetapkan sumber yang memiliki kredibilitas, mampu mengidentifikasi tuntutan dan argumen-argumen yang ambiguistik, mampu mengidentifikasi asumsi-asumsi yang tidak diungkapkan, mampu menditeksi bias, mampu mengidentifikasi logika-logika yang keliru, mampu mengenali logika yang tidak konsisten, dan mampu menetapkan argumentasi atau tuntutan yang paling kuat.
03	Kemampuan Memproses Informasi	Kemampuan untuk mengingat dan mengutarakan kembali sebuah informasi, kemampuan menerjemahkan informasi, kemampuan menafsirkan informasi, kemampuan mengaplikasikan informasi, kemampuan menganalisis, membandingkan dan mengklasifikasi informasi, kemampuan mensintesiskan informasi, kemampuan mengevaluasi, dan kemampuan menyimpulkan, dengan pendekatan induktif, deduktif maupun analogis.

Gambar 11
Siklus Perencanaan Pembelajaran
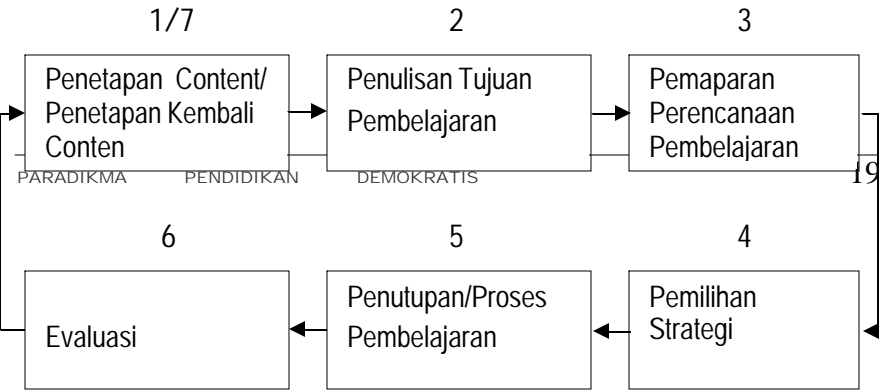
Gambar 13

Beberapa Pilihan Pengayaan
Bagi Siswa-Siswa Yang Cepat Menyelesaikan Tugas

No	Jenis Kegiatan	Indikator-Indikator Kecakapan
01	Membaca bebas	Rak buku atau masalah disiapkan dibelakang ruangan kleas untuk sewaktu-waktu dipergunakan oleh siswa untuk membaca dalam rangka pengayaan kemampuan keilmuan mereka.
02	Permainan	Sbahagiaan ruangan kelas dikosongkan, dan para bisa melakukan permainan game akademik sesuai mata pelajaran yang mereka pelajari.
03	Komputer	Guru mempersiapkan berbagai menu berupa *software* game atau simulasi yang terkait dengan pelajaran, dan dapat digunakan oleh siswa untuk menghabiskan waktu luangnya setelah menyelesaikan tugas-tugasnya.
04	Pusat belajar.	Berupa bahan-bahan ajar yang disiapkan guru, dan sudah lengkap dengan tujuan learning guidenya.
05	Riset Individual *(Project)*	Dalam mengisi waktu luangnya,m siswa juga bisa mengerjakan tugas riset individualnya.
06	*Peer Tutoring*	Tutorial sebaya, yakni mereka yang telah memiliki pemahaman baik tentang bahan ajar, ditugaskan oleh guru untuk mendampingi mereka yang belum memiliki pemahaman baik tentang tugas-tugas dalam proses pembelajarannya.

Berbagai strategi dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan hasil, dengan pendekatan pendidikan yang sangat mempertimbangkan multikultur, yaitu:

1. Siswa harus diberi kepercayaan.
2. Hargai latar belakang kultur mereka.

3. Tingkatkan partisipasi keluarga.
4. Bantu siswa-siswa dalam mengembangkan skil sosialnya.
5. Gunakan strategi pembelajaran interaktif.
6. Ajarkan mereka dengan adil dan penuh perhatian.
7. Pahami siswa-siswa anda.
8. Buang sikap anti toleransi.
9. Refleksikan kultur Anda sendiri.
10. Bacalah literature-literatur multikultur.
11. Sampaikanlah pertanyaan-pertanyaan berkualitas tinggi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa.
12. Sediakan peluang akses yang sama bagi semua siswa.
13. Kurangi sikap prejudice (prasangka) dan pahami hak-hak mereka.
14. Tentukan teks yang dibutuhkan.

Gambar 14
Struktur Kompetensi
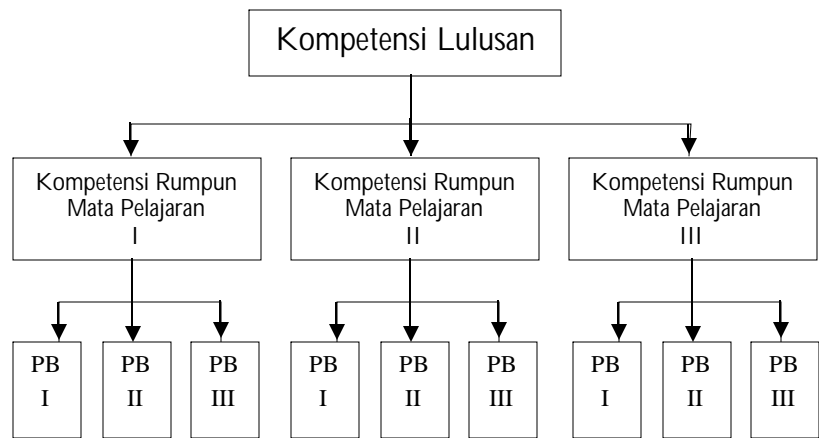
Tabel 3

Tabel Indikator
Kompetensi Setiap Level Dari Setiap Ranah
Adaptasi Contoh Kenneth D. Moore

No	Ranah	Level Kecakapan	Indikator Kecakapan
01	Kognitif	*Knowledge* (Mengetahui dan mengingat)	Menyebutkan, menuliskan, menyatakan, mengurutkan, mengidentifikasi, mendifinisikan, mencocokan, menamai, melabeli, menggambarkan.
02		*Cimprehension* (Pemahaman)	Menerjemahkan, mengubah, menggeneralisasi, menguraikan (dengan kata-kata sendiri), menulis ulang (dengan kalimat sendiri) meringkas, membedakan (diantara dua), mempertahankan, menyimpulkan,

			berpendapat, dan menjelaskan.
		Application (Penerapan ide)	Mengoperasikan, menghasilkan, mengubah, membatasi, menggunakan, menunjukkan, mempersiapkan, dan menghitung.
		Analysis (Kemampuan menguraikan)	Menguraikan satuan menjadi unit-unit yang terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian-bagian, membedakan antara dua yang sama, memilih, dan mengenai perbedaan (diantara beberapa yang dalam satu kesatuan)
		Synthesis (Unifikasi)	Merancang, merumuskan, mengorganisasikan, mengompilasikan, mengomposisikan, membuat hipotesis, dan merencanakan.
		Evaluation (Menilai)	Mengkritisi, mengintepretasi, menjastifikasi dan memberikan penilaian
02	Afektif	*Receving* (Penerimaan)	Mempercayai (sesuatu atau seseorang untuk diikuti), memilih (seseorang atau sesuatu untuk diikuti), mengikuti, bertanya (untuk diikuti), dan mengalokasikan.
		Responding (Tanggapan)	Mengkonfirmasi, memebri jawaban, membaca (pesan-pesan), membantu, melaksanakan, melaporkan, dan menampilkan.
		Valuing (Penanaman nilai)	Menginisiasi, mengundang (orang untuk terlibat), terlibat, mengusulkan dan melakukan.
		Chaaracterization (Karakterisasi kehidupan)	Menggunakan nilai-nilai sebagai pandangan hidup *worldview),* mempertahankan nilai-nilai yang sudah diyakini.
03	Psikomotorik	*Oberving* (Memperhatikan)	Mengamati proses, memberi perhatian pada tahap-tahap sebuah perbuatan, memebri perhatian pada sebuah artikulasi.
		Imitation (Peniruan)	Melatih, mengubah sebuah bentuk, membongkar sebuah struktur, membangun kembali sebuah struktur, dan menggunakan sebuah konstruk, atau model.
		Practicing (Pembiasaan)	Membiasakan sebuah model atau perilaku yang sudah dibentuknya. Mengontrol kebiasaan agar tetap konsisten.
		Adapting (Penyesuaian)	Menyesuaikan model, membenarkan sebuah model untuk dikembangkan, dan menyekutukan model pada kenyataan.

Evaluasi merupakan bagian yang juga penting dalam pembelajaran efektif, yakni guru harus menyelenggarakan evaluasi di akhir setiap sesi pelajaran, baik untuk melihat efektifitas strategi yang dia kembangkan, maupun untuk mengukur hasil belajar siswa yang dapat dijadikan input untuk perencanaan pembelajaran berikutnya. Jika guru tidak mempunyai data tentang keberhasilan hari itu, dia tidak akan

memiliki informasi yang cukup dalam perencanaan berikutnya, sehingga tragedy penumpukkan akumulasi ketidakpahaman siswa juga akan terulang, dan sekolah akan terus dikritik oleh client-nya karena meluluskan siswa dengan nilai di bawah standar minimal penguasaan bahan ajar.

Model perencanaan prosedur pembelajaran yang di tawarkan Hunts memuat aspek-aspek sebagai berikut:
Pokok Bahasan,
Sub-Pokok Bahasan
Tujuan umum (dalam model terakhir, kompetensi),
Tujuan khusus, (indicator kompetensi)
Prosedur dan Materi:

1. Review, melakukan diskusi singkat tentang pelajaran lalu dan hubungannya dengan yang akan dipelajari hari ini.
2. Overview, menjelaskan outline bahan-bahan ajar hari itu untuk didiskusikan.
3. Presentation, menjelaskan inti pelajaran hari itu dengan telling, showing dandoing.
4. Exercise, yakni memberikan kesempatan pada siswa untuk melatihkan apa yang telah mereka pahami dalam proses pembelajaran.
5. Summary, terakhir merumuskan summary.

Gambar 13
Alur Komunikasi Kelas
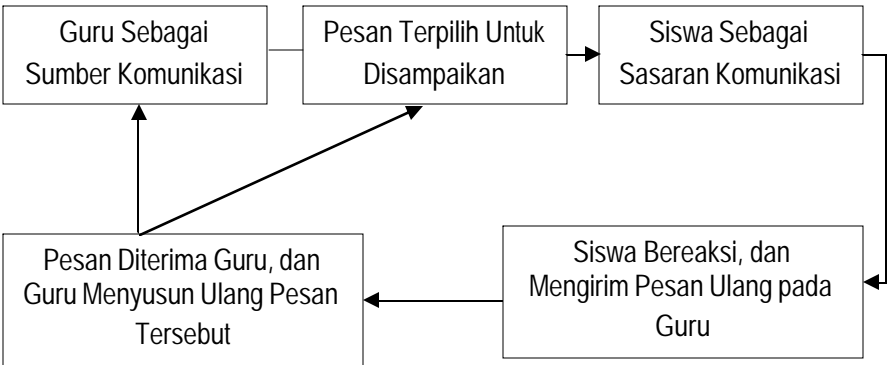
Sementara itu Kennet D. Moore secara realitas memberikan pandangan, bahwa tidak semua guru memiliki bakat pembicara yang baik, namun mereka harus menjadi komunikator yang efektif. Untuk itu, guru harus melatih vokalnya dan irama penyampaian pelajarannya, sehingga tidak sekadar efektif menyampaikan pesan, tapi juga nikmat untuk didengar. Sejalan dengan pandangannya itu, Moore membagi komunikasi verbaluntuk proses pembelajaran ini menjadi dua, yaitu verbal learning dan vocal learning. Verbal learning adalah proses pembelajaran yang dilakukan siswa dengan memahami apa yang disampaikan guru melalui kata-kata yang diucapkannya. Dalam konteks ini, guru menyampaikan pesan-pesan pembelajarannya, serta berbagai uraian tentang bahan ajar dengan menggunakan bahasa lisan sesuai kemampuan dan kebiasaannya dia berbicara. Oleh sebab itu, tingkat pemahaman siswa sangat dipengaruhi oleh beberapa factor sebagai berikut.

1. Pengorganisasian bahan ajar, semakin baik bahan-bahan uraian itu terorganisasikan, maka akan semakin baik tingkat pemahaman siswa terhadap bahan-bahan tersebut.

2. Kejelasan kata, yakni menggunakan kata-kata yang jelas dan bermakna pasti hanya satu makna, lebih baik daripada menggunakan kata-kata bermakna ganda, sehingga pemahaman siswa sesuai dengan maksud yang diucapkan oleh gurunya. Namun tidak boleh untuk memaksakan penggunaan kata-kata yang jelas dengan mengabaikan inti pesan.

3. Untuk mempermudah pemahaman, sebaiknya informasi diperjelas dengan contoh-contoh dua arah, arah yang dimaksud dan arah yang tidak dimaksud, atau contoh yang salah, supaya siswa memahami dengan baik maksud pesan yang disampaikan.

Inilah makna verbal learning dan upaya-upaya peningkatan efektifitasnya dalam belajar. Sedangkan vocal learning adalah proses pembelajaran yang dialkukan siswa dengan memahami pesan-pesan yang diucapkan guru dengan tempo yang sedang, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, tinggi rendah nada suara yang diatur, dan intonasinya disesuaikan dengan pesan yang disampaikan. Penggunaan vocal yang baik, intonasi yang pas, tempo yang sedang dan ritme yang sesuai dengan alur pesan akan membantu efektifitas penyamapain pesan dalam proses pembelajaran, dan membantu pemahaman siswa terhadap pesan-pesan yang dibawakan guru tersebut.

Kemudian dari itu, sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa komunikasi guru dengan siswanya, juga bisa menggunakan model komunikasi non-verbal, yakni komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, tidak bisa didengar dan juga tidak bisa dibaca dalam uraian kata-kata tertulis. Komunikasi non-verbal hanya bisa dipahami dari berbagai isyarat gerakan anggota tubuh yang mengekpresikan sebuah pesan. Setidaknya ada tujuh (7) bentuk gerakan tubuh yang biasa dan bisa digunakan guru dalam berkomunikasi dengan siswa-siswanya, yakni sebagaimana terlihat dalam diagram berikut ini:

Gambar 15
Macam-Macam Model Komunikasi Non-Verbal Dalam Kelas
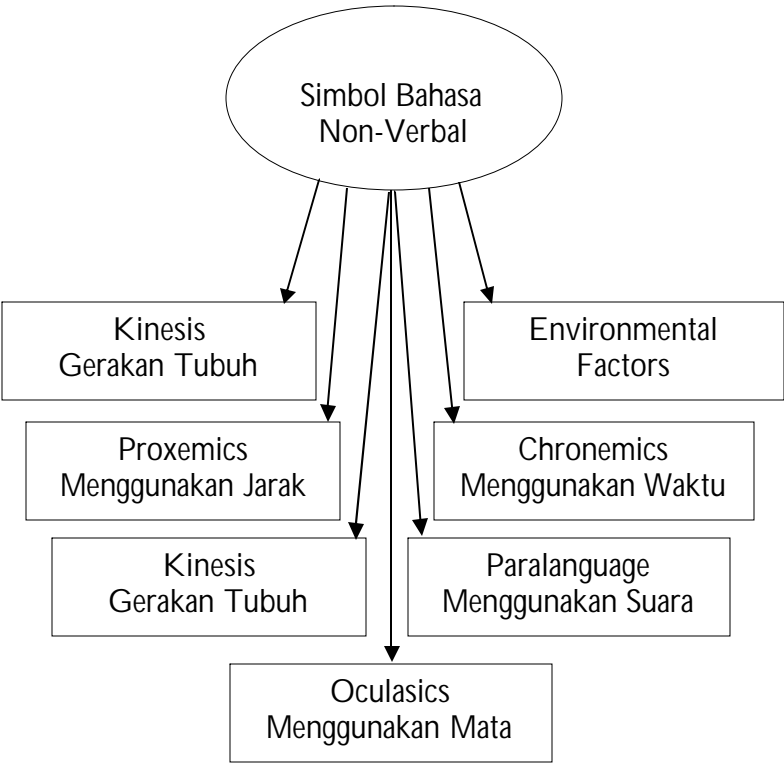
Daftar Pustaka: Dr. Dede Rosyada, MA, Paradigma Pendidikan Demokratis, "Sebuah Model Pelibatan Masyarakat DdalamPenyelenggaraan Pendidikan", Kencana, 2004.